

Hubungan Penerimaan *Money Politic* dengan Tingkat Partisipasi Politik dalam Pilkades

HUBUNGAN PENERIMAAN *MONEY POLITIC* DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MUNUNG KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

Dewi Ratnasari

12040254205 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) ratnasarid169@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) agussatmokoadi@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan suatu kewajiban bagi warga negara untuk memilih calon pemimpin yang baik dan bijaksana serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan di desa, kepala desa dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Dan kepala desa mempunyai masa jabatan 5 tahun. Sedangkan dalam pemilihan kepala desa berbagai cara akan dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan termasuk memberi uang suap atau politic uang kepada masyarakat desa munung kec jatikalen kab nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua sampel, teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus prosentase untuk mengitung angket dan chi kuadrat untuk mengetahui hubungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politik. Penelitian ini menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara penerimaan *money politic* dengan tingkat partisipasi politik. Hal tersebut terbukti berdasarkan hasil analisis data menggunakan rumus Chi Kuadrat, adanya kesimpulan tersebut dibuktikan dari perhitungan tersebut diperoleh bahwa harga chi kuadrat lebih kecil dari tabel (1366,24 3, 841) sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Dimana yang artinya terdapat hubungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di desa munung kec jatikalen kab Nganjuk

Kata Kunci : penerimaan money politic, tingkat partisipasi politik

Abstract

Village elections is an obligation for citizens to vote for a good leader and a wise and responsibility to perform the duties of the village. The village chief is a leader who set the course of the village administration, village heads elected by the people for the people. And the village head has a term of 5 years. While in the village elections will be conducted in various ways to gain power, including giving bribes or money politics to people in rural districts munung kec jatikalen Nganjuk.

This study aims to determine the relationship receipt of money politics to the level of political participation in village elections. This study uses a quantitative approach to the two samples, data collection techniques using questionnaires and documentation. The technique used in this study using a formula to calculate the percentage of questionnaires and chi square to determine the relationship of acceptance of money politics to the level of political participation. The study concluded there is significant correlation between the acceptance of money politico with the level of political participation. This is proven by the results of the analysis of the data using formulas Chi Square, the conclusion is proved from these calculations showed that the price of chi squared smaller of the table (1366,24 3, 841) so that the alternative hypothesis (H_a) is accepted and the null hypothesis (H_0) is rejected. Which means there is a relationship in which the acceptance of money politics to the level of political participation in the election of village heads in rural districts munung kec jatikalen Nganjuk

Keyword: Keywords: acceptance of money politics, the level of political participation

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah demokrasi bagi masyarakat Desa dalam hal kebebasan untuk dipilih

atau memilih Pemimpin Desa, seperti yang terjadi di Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang akan dibuat penelitian, berbagai macam usaha yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa untuk

memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat agar memperoleh suara terbanyak dalam ajang pemilihan Kepala Desa tersebut. Salah satu cara yang merupakan rahasia umum dan merupakan hal biasa bagi masyarakat desa adalah dengan memberikan money politic kepada masyarakat yang sudah wajib untuk memilih. Karena money politic merupakan hal biasa bagi masyarakat dan seakan-akan seperti hal yang setengah wajib dilakukan oleh Calon Kepala Desa hal tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik dan mempunyai keterkaitan yang dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa.

Desa merupakan cerminan dari Negara, karena desa adalah bagian pemerintahan paling kecil dan paling bawah dari Negara. Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dari demokrasi tingkat desa, dimana kehidupan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Dan termasuk dalam pemilihan kepala desa yang wajib secara langsung memilih calon kades. Pemilihan kepala desa bukan saja pemilihan yang secara langsung hanya memberikan visi dan misinya, melainkan mempunyai cara untuk menguasai sebuah kekuasaan yang akan di raih dan di inginkan yaitu memberikan money politic kepada masyarakat yang sudah memilih.

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2001:147) partisipasi politik di anggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga di catat bahwa partisipasi politikpun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik,, sosialisasi tidak dapat berjalan. Memilih pemimpin yang benar dan bijaksana tidak dapat di laksanakan tanpa adanya keikut sertaan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Penelitian ini membahas bagaimana partisipasi politik yang sudah menerima money politic dan setelah pilkadesnya dimulai, yang menerima money politic mengikuti pemilihan seta ikut dalam suara pencoblosan dalam pilkades.

Berdasarkan penelitian awal dapat di analisis bahwa orang yang tidak menerima suap maka tidak mengikuti pencoblosan dalam pemilihan kades, karena bagi mereka tidak adil yang lain menerima money politic sedangkan mereka tidak mendapatkan. Penelitian ini memberikan angket kepada 40 masyarakat yang tidak menerima dengan cara bertanya terlebih dahulu apakah menerima money politic atau tidak.

Sehingga dalam penelitian ini lebih mudah mendapatkan hasil penelitian, dengan menyebarkan angket kepada 60 masyarakat yang menerima money politic dan 40 masyarakat yang tidak menerima money politic. Data-data nama yang menerima dapat dilihat di dokumentasi yang diperoleh dari salah satu kandidat calon kades, karena mendata masyarakat yang diberi

money politic atau sembako dengan yang tidak mendapatkan money politic.

Menurut Hamid (2009:45) yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai *money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politic*. Bagi politisi, *money politic* merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat *money politic* ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Hal inilah yang menjadi ironi adanya *money politics* dalam masyarakat.

Money politics tidak akan pernah jauh terpisah dari partisipasi politik, semua masyarakat pasti akan mengeluarkan suaranya demi desanya yang akan menjadi baik tetapi dengan adanya money politics juga. Jika tidak ada politik uang maka suara rakyat dari beribu rakyat hanya sedikit yang mencoblos, karena kita ketahui bahwa masyarakat desa tidak sama dengan masyarakat kota. Desa sangat mementingkan dan membudidayakan money politik di setiap pemilihan umum. Karena dengan adanya money politic masyarakat semangat untuk memilih atau mencoblos. Sehingga money politics sangat berpengaruh pada masyarakat dan tingkat partisipasi politik akan semakin meningkat sesuai dengan jumlah penduduk di Desa Munung Kabupaten Nganjuk

Adanya praktik money politics menunjukkan bahwa para calon pejabat publik yang akan menduduki pemerintahan tidak benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka jalan keluarnya dengan mendorong, mengajak dan membeli suara pemilih. Praktek semacam itu biasanya dilakukan saat kampanye menjelang ajang persemajaan demokrasi dengan disertai visi, misi dan program kerja yang dijanjikan oleh calon pejabat publik akan menumpang segala aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Dalam pemilihan umum praktek money politics sudah menjadi budaya bahkan dilestarikan dalam pesta demokrasi dinegara kita sebagai usaha untuk mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan apalagi pada pemilihan kepala desa, fenomena tersebut sudah di anggap biasa dan umum bahkan dilakukan secara terang-terangan. Hal itu dikarenakan adanya hubungan saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain. (Indra Ismawan, 1999:164).

Menurut Hamid (2009:65) mengemukakan Dampak yang dihadirkan akibat dari *money politic* yaitu

“dampak bagi masyarakat maupun dampak bagi para calon kepala desa itu sendiri. Dampak bagi para calon kepala desa sendiri ada dua sisi, yang pertama apabila mereka berhasil terpilih karena

suksesnya *money politic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon kepala desa yang gagal dalam *money politics* yang mereka lakukan. Bagi para calon kepala desa yang gagal dampaknya pada psikologi dan kesehatan mereka. Tidak sedikit dari para calon kepala desa yang gagal akhirnya frustrasi dan hampir gila atau mendadak terkena serangan jantung. Hal ini karena mereka sudah keluar banyak uang dan tidak terpilih dalam Pilkadaes”

Dampak *money politics* dalam masyarakat sendiri terlihat bahwa *money politics* dijadikan ajang mencari penghasilan. Masyarakat awam tidak mepedulikan nilai-nilai demokrasi. Bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah. Dampak lain terlihat dengan rendahnya kepercayaan lagi dari masyarakat kepada para calon kepala desa. *Money politics* bisa juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat telah berhutang budi kepada calon kepala desa yang telah memberikan bentuk penyuapan, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon kepala desa lainnya buruk dibandingkan yang mereka dukung, di sinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon kepala desa.

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya (Budiardjo, 1994:183). Sedangkan menurut Surbakti (1992:118)

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan”

Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara untuk ikut serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik dengan maksud agar kebijakan politik yang dibentuk oleh elit politik sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat, sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Dan dengan adanya penerima *money politic* dapat meningkatkan pemilih untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa.

Menurut Surbakti (1999:141) Menjelaskan ciri-ciri kegiatan partisipasi politik antara lain : (1) Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat di amati,

bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. (2) Kegiatan itu di arahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. (3) Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintahan termasuk dalam konsep partisipasi politik. (4) Kegiatan mempengaruhi pemerintahan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan kegiatan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintahan melalui pihak yang di anggap dapat menyakinkan pemerintahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintahan adalah penilaian seseorang terhadap pemerintahan, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak . Surbakti (1999:144)

Terdapat beberapa agen sosialisasi politik yang bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik, sehingga mampu menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat. Rush dan Althoff mengartikan 5 agen sosialisasi politik yang umumnya diketahui yaitu : (1) Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang dapat membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah ibu, saudara, memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. (2) Sekolah merupakan lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaannya, tetapi disekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri, sebagai tempat yang cukup efektif dalam mendidik seorang anak untuk menepi masa tanggung jawab untuk kewajiban dan haknya. (3) Media Massa Kelompok media massa adalah media cetak (surat, majalah, tabloid) media elektronik (radio, televisi, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas frekuensi pesan yang disampaikan. (4) Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik , pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melihat diri dalam politik pendidikan, dimana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, dan sejenisnya. Melalui tindakan pemerintah

orientasi efektif individu bisa berpengaruh dan ini mempengaruhinya. (5) Partai politik adalah agen sosialisasi secondary group. Partai politik biasanya membawa kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin baru, dan kebijakan yang ada. Rush dan Althoff (1997:89-91)

Sosialisasi politik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian politik dalam arti bahwa seseorang memperoleh orientasi politik yang memiliki tiga unsur. Nilai-nilai dan keyakinan yang mendasar pengetahuan dan informasi serta perspektif politik. Oleh sebab itu ia merupakan proses dimana perubahan kultur tertentu menuju orientasi dari praktek politik yang terjadi.

Surbakti (199:144) mengemukakan faktor-faktor pembentuk partisipasi politik yaitu :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintahan adalah penilaian seseorang terhadap pemerintahan, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak”

Teori dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik individual yang berasumsi bahwa berasumsi bahwa partisipasi politik masyarakat dapat ditinjau dari partisipasi politik individual, kemudian dari konsep tersebut, partisipasi politik dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe partisipasi politik menurut konsep paige yaitu (1) Partisipasi politik aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. (2) Partisipasi politik pasif tertekan apatis, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemimpin rendah. (3) Partisipasi politik militan radikal, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintahan sangat rendah. (4) Partisipasi politik pasif, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi. M.L Goel (2001:157)

Berdasarkan konsep dan teori di atas, kemudian dihubungkan dengan penelitian ini, maka mengetahui bahwa pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan

kepala desa dengan adanya model-model partisipasi masyarakat seperti adanya money politik permainan politik yang dilakukan di saat pemilihan kepala desa. Jika masyarakat tanpa money politik maka akan berkurang partisipasi politiknya dalam mengikuti pencoblosan pemilihan kepala desa. Maka penerima money politik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan partisipasi politik karena dengan masyarakat yang diberi money politik pasti akan memilih

METODE

Pengertian metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang berarti cara atau jalan yang diempuh, sedangkan menurut KBBI metode adalah cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian menurut teori empirisme yang dikembangkan oleh John Lock menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman empiris, pengalaman yang diperoleh secara indrawi, pengalaman melalui pengamatan. Yang dimaksud di sini ialah maka penelitian harus dilakukan secara sistematis dan terbukti secara langsung dengan menggunakan beberapa cara untuk menuju suatu jalan sehingga didapatkan hasil sesuai dengan realita.

Pendekatan kuantitatif dinamakan pendekatan tradisional karena pendekatan ini sudah cukup lama digunakan sehingga mudah mentradisi sebagai pendekatan untuk penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk angka-angka atau menggunakan statistik. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sugiyono (2011:7), bahwa sebuah penelitian dinamakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *ex pos facto*. Istilah lain penelitian ini adalah penelitian sesudah kejadian (PSK). Adapula yang menyebutnya sebagai penelitian *Kausal Komparatif*. Penelitian ini bertujuan membandingkan dua atau tiga peristiwa yang sudah terjadi melalui hubungan sebab akibat dengan cara mencari sebab-sebab terjadinya peristiwa berdasarkan pengamatan akibat-akibat yang mungkin tampak dan teramati. (Subana dan Sudrajat, 2009:42)

Lokasi yang digunakan adalah di Desa Munung merupakan Desa yang sudah melakukan Pemilihan Kepala Desa, Desa Munung mempunyai 5 dusun yang digunakan sebagai sampel yaitu Dusun Jetis, Dusun Kedungmojo, Dusun Munung pinggiran, Dusun Kandangan, dan Dusun Pulo Krangkong.

Menurut Sugiyono (2013: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Munung yang berusia 17 tahun keatas dengan jumlah populasi 858 jiwa pemilih dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Populasi penelitian

No	Nama Dusun	Jumlah	Menerima <i>money politic</i>	Tidak Menerima <i>Money Politic</i>
1	Jetis	125	48	77
2	Kedungmoj	168	120	48
3	Munung	313	300	13
4	Kandangan	100	60	40
5	Pulo Krangkong	153	125	28
jumlah		858	653	205

Dari lima dusun tersebut memberikan penjelasan bagaimana pengaruh-pengaruh penerima *money politic* di dalam Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan pada tahun 2015, sehingga dari jiwa pemilih dan mendapatkan *money politic* memberikan dapat memberikan jawaban-jawaban terkait penelitian ini.

Variabel penelitian dengan objek kajian yang akan diteliti. Variabel penelitian adalah hal yang diteliti atau diselidiki dalam suatu penelitian atau obyek penelitian yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto 2006:96). Variabel dalam penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa yaitu :

a. Variabel bebas (X) yaitu Penerimaan *Money politic* dalam pemilihan Kepala Desa

I = Menerima *Money Politic*

II = Tidak Menerima *Money Politic*

b. Variabel terikat (Y) yaitu Partisipasi Politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Munung Kabupaten Nganjuk.

Teknik pengumpulan data menggunakan angket, Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui

peneliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka yaitu salah satu jenis angket dimana item pertanyaan pada angket juga disertai beberapa kemungkinan jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban dan nilainya paling disukai. Angket digunakan untuk mencari hubungan dengan peran dari kegiatan pemilihan kepala desa. Dan Dokumentasi Menurut Arikunto (2006: 158) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan cara peta daerah dimana peta daerah memberikan pengetahuan bagaimana keadaan yang ada di Desa Munung dan data penduduk yang sudah memilih berapa jiwa serta foto kepala desa dan tingkat partisipasi politik yang ada di Desa Munung Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk.

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah yang berusia 17 tahun ke atas, selain itu juga memiliki latar belakang pendidikan dari tingkat Dasar, Menengan dan Atas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini mengambil sampel dengan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{N + 1}$$

$$N(d^2) + 1$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

D : Derajat Kebebasan

Misal : 0,1 , 0,05 atau 0,01

$$n = \frac{858}{858 + (0,1^2) + 1} = \frac{858}{858 + 0,01 + 1} = \frac{858}{859,01} \approx 858$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Dari sampel tersebut akan dibagi ke dalam 5 Dusun yang masing-masing dusun di ambil 20 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *cluster sampling*.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan skala Guttman yang dikembangkan oleh dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala Guttman disebut juga metode *scalogram* atau analisa skala (*scale analysis*) sangat baik untuk menyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau sifat yang diteliti, yang sering disebut isi universal (*universe of content*) atau atribut universal (*universe attribute*). Sehingga dalam penelitian ini yaitu untuk menyakinkan peneliti apakah terdapat hubungan

antara penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politik dengan menentukan skor pada setiap pertanyaan pada angket. Selanjutnya bentuk alternatif jawaban atau respon angket berupa taraf frekuensi subyek dalam variasi, sebagai berikut:

Tabel 1. Keterangan Skala Gutman

No	Kriteria	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Untuk menghitung persentase dari hasil kuesioner yang telah diolah, digunakan persamaan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono (2008)

Keterangan:

- P : Persentase
f : Frekuensi data
N : Jumlah sampel yang diolah

Dengan kriteria skor hasil angket sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Hasil Nilai Angket

skor	kategori
15-17	Sangat Tinggi
10-14	Tinggi
5-9	Rendah
0-4	Sangat Rendah

Uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan Chi Kuadrat (χ^2) untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yaitu tentang hubungan money politic dengan penerimaan money politic terhadap tingkat partisipasi politic dalam pemilihan kepala desa dengan skala datanya berbentuk nominal dan sampel datanya > 40 dengan rumus sebagai berikut :

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_h)^2}{f_h} \Rightarrow f_h = \frac{(N_k \cdot N_g)}{N}$$

Dengan db = (b-1) (k-1)

db = (2-1) (5-1)

db = 1. 4

db = 4 (9, 488 dengan taraf signifikansi 5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politic mempunyai hubungan, dapat dilihat dari nilai dalam dua sampel yaitu responden penerima money politic dengan responden yang tidak mendapatkan money politic. Dalam perhitungan prosentase nilai tertinggi yaitu responden yang mendapatkan money politic dan dalam setiap item memiliki nilai yang tinggi.

Tabel 3. Partisipasi Politik
Responden yang Menerima *Money Politic*

Kategori Angket	f	prosentase
Sangat Tinggi	15	25%
Tinggi	43	71,66%
Rendah	2	3,33%
Sangat Rendah	0	0
Jumlah	60	99,99%

Hasil jumlah angket pada indikator partisipasi politik dengan jumlah 60 responden yang menerima money politic, pada pertanyaan-pertanyaan tentang partisipasi politik terbagi menjadi tiga golongan yaitu sebelum pemilihan kepala desa, saat pemilihan kepala desa, sesudah pemilihan kepala desa. Saat sebelum pemilihan kepala desa dimana soal pertanyaan tersebut meliputi keikutsertaan sosialisasi dan keikutsertaan kampanye pada soal nomer 4 dan 5 dari hasil jumlah angket pada masyarakat yang menerima money politic semua mengikuti kampanye dan sosialisasi pada saat sebelum pemilihan kades, saat pemilihan kepala desa dilaksanakan 60 responden yang menerima 100% mencoblos calon kades yang memberikan money politic maupun fasilitas umum kepada warga desa munung tersebut. dan setelah pemilihan kades masyarakat desa munung telah mengikuti alur-alur atau prosedur yang ditetapkan oleh kades baru. Sehingga partisipasi pada masyarakat desa munung meningkat. Dan perolehan jumlah nilai angket pada masyarakat yang mendapatkan money politic berjumlah 48 responden mendapatkan skor Sangat Tinggi 12, responden mendapatkan skor Tinggi. Sehingga dari hasil tersebut partisipasi politik masyarakat desa munung dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pada jumlah prosentase nilai tertinggi di peroleh kategori tinggi dengan jumlah 71,66%, masyarakat yang menerima money politic lebih berpendapat dan berpartisipasi pada pemilihan kepala desa, tidak hanya pada saat pemilihan kepala desa saja melainkan setelah pemilihan kepala desa dan mendapatkan kepala desa yang baru, sehingga keaktifan masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi dalam bermasyarakat. Dan peroleh kategori sangat tinggi berjumlah 25%, kategori rendah 3,33%, kategori sangat rendah 0% pada kategori sangat rendah tidak terdapat skor sama sekali karena masyarakat yang mendapatkan money politic sangat setuju dengan adanya pemilihan kepala desa dan partisipasi poliiknya semakin meningkat, sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat yang mendapatkan money politic lebih mengutamakan partisipasi politiknya.

Tabel 4. Partisipasi Politik
Responden yang Tidak Menerima *Money Politic*

Kategori Angket	f	prosentase
Sangat Tinggi	0	0
Tinggi	5	12,5%
Rendah	30	50%
Sangat Rendah	5	12,5%
Jumlah	40	75%

Pada responden masyarakat yang tidak menerima money politik kategori yang diperoleh paling tinggi pada tingkat Rendah dengan jumlah 30 dan prosentasenya 50% pada kenyataannya masyarakat yang tidak menerima money politik tingkat partisipasinya sangat rendah tidak hanya pada awal pemilihan kades saat pemilihan kades hampir masyarakat yang tidak mendapatkan money politic sama sekali tidak mencoblos dalam pemilihan kades, pada indikator partisipasi politik dan tergolong menjadi tiga bagian yaitu sebelum pemilihan kepala desa, saat pemilihan kepala desa dan sesudah pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan kepala desa dimana calon kepala desa mengadakan sosialisasi dan kampanye yang di ikutsertakan masyarakat desa munung, tetapi pada kenyataannya responden pada penelitian ini tidak mendapatkan money politik dan tidak mengikuti jalannya proses sebelum sampai sesudah pemilihan kepala desa. Jumlah yang diperoleh pada responden yang tidak menerima money politik adalah 30 responden mendapatkan keterangan rendah, 5 responden mendapatkan keterangan sangat rendah, 5 responden mendapatkan keterangan tinggi. Dapat dilihat bahwa tanpa adanya money politik maka masyarakat tidak meningkatkan partisipasi politik, dari wawancara yang di amati bahwa masyarakat desa munung tanpa menerima money politic maka masyarakat tersebut tidak memilih dan lebih mengutamakan kerjanya sebagai buruh tani yang selama ini dilakukan setiap hari karena lahan yang besar sehingga mudah untuk bercocok tanah dan mudah untuk melakukan pertanian di sekitar desa munung tersebut, sehingga masyarakat lebih mementingkan bertani daripada pergi merantau.

Tabel 5. Partisipasi Politik (Keikutsertaan Sosialisasi dan Kampanye)

Masyarakat yang Mendapatkan *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu calon kades	55
2. Saya mengikuti kampanye sebelum dilaksanakan pemilihan kades	50

Pertanyaan angket pada variabel partisipasi politik dan indikator sebelum pemilihan kades yaitu

keikutsertaan sosialisasi dan mengikuti kampanye, pada soal nomer 4, mendapatkan skor 55 dengan pertanyaan Saya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu calon kades dan yang menjawab Ya berjumlah 55 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 5 responden.

Tabel 6. Partisipasi Politik (Mencoblos dan Keaktifan Pelaksanaan Dalam Pemilihan Kades)
Masyarakat yang Mendapatkan *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengikuti Proses dalam pilkades	55
2. Saya mencoblos calon kades yang memberi money politic	60
3. Saya mencoblos calon kades yang tidak memberi money politic	60
4. Saya memahami prosedur pemilihan kades sebelum mencoblos calon yang saya pilih	4
5. Saya mengetahui bakal calon kades	60
6. Kritik yang diberikan oleh pemilih merupakan wujud nyata dari penyaluran partisipasi politik	50
7. Saya memberikan saran kepada panitia pelaksanaan pilkades	45
8. Saya mendiskusikan masalah kades dengan warga lainnya	60
9. Saya mencermati proses pemilihan kades	55

Kuesioner ke 6, dengan pertanyaan Saya mengikuti proses proses dalam pilkades mendapatkan skor 55 dan yang menjawab Ya berjumlah 55 responden dan yang menjawab Tidak 5 responden, pada kuesioner 7, dengan pertanyaan Saya mencoblos calon kades yang memberi money politic mendapatkan skor 60 dan yang menjawab Ya berjumlah 60 responden sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 0 responden. Kuesioner 8, dengan pertanyaan Saya mencoblos calon kades yang tidak memberi money politic mendapatkan skor 4 dan yang menjawab Ya berjumlah 4 responden dan 56 responden menjawab Tidak. Kuesioner 9 dengan pertanyaan Saya memahami prosedur pemilihan kades sebelum mencoblos calon yang saya pilih mendapatkan skor 60 dan yang menjawab Ya berjumlah 60 responden sedangkan yang menjawab Tidak 0 responden. Kuesioner 10 dengan pertanyaan Saya mengetahui bakal calon kades mendapatkan skor 50 dan yang menjawab Ya berjumlah 50 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 10 responden. Kuesioner 11, dengan pertanyaan kritik yang diberikan oleh pemilih merupakan wujud nyata dari penyaluran partisipasi politik dengan skor 45 dan yang menjawab Ya berjumlah 45 responden sedangkan 15 responden menjawab Tidak. Kuesioner 12 dengan pertanyaan saya memberikan saran kepada panitia pelaksanaan pilkades mendapatkan skor 60 dan yang menjawab Ya berjumlah 60 responden dan yang

menjawab Tidak berjumlah 0 responden. Kuesioner 13, saya membicarakan masalah kades dengan warga lainnya mendapatkan skor 45 dan yang menjawab Ya berjumlah 45 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 15 responden. Kuesioner 14, dengan pertanyaan saya mencermati proses pemilihan mendapatkan skor 55 dan yang menjawab Ya berjumlah 55 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 5 responden.

Tabel 7. Partisipasi Politik(Mengikuti kegiatan baru oleh kades baru)

Masyarakat yang Mendapatkan *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengetahui Perhitungan Jumlah pemilih pada saat setelah pemilihan kades	50
2. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	53
3. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	42

Kuesioner 14, dengan pertanyaan Saya mengikuti perhitungan jumlah pemilih pada saat setelah pemilihan kades mendapatkan skor 50 dan yang menjawab Ya 50 responden dan 10 responden menjawab Tidak. Kuesioner 15, Saya mengikuti kegiatan-kegiatan baru yang diselenggarakan oleh kades baru mendapatkan skor 53 dan yang menjawab Ya berjumlah 53 responden dan 7 responden menjawab Tidak. Kuesioner 17, kegiatan-kegiatan yang dilakukan kades baru memberikan kemajuan bagi desa Munung mendapatkan skor 42 dan yang menjawab Ya berjumlah 42 responden dan 18 responden menjawab Tidak.

Tabel 8. Partisipasi Politik(Mewujudkan Menyalurkan Partisipasi Politik)

Masyarakat yang Mendapatkan *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengetahui Perhitungan Jumlah pemilih pada saat setelah pemilihan kades	50
2. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	53
3. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	42

Kuesioner 18, dengan pertanyaan Saya mengikuti kebijakan dan menjalankan kebijakan kades skor 41 dan yang menjawab Ya berjumlah 41 responden sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 19 responden, kuesioner 19, dengan pertanyaan Saya mengawasi jalannya kepemimpinan kepala desa mendapatkan skor 60 dan yang menjawab Ya berjumlah 60 responden dan yang menjawab Tidak 0 responden. Kuesioner 20, dengan pertanyaan Saya mengkritisi apapun kebijakan yang dibuat oleh kades munung mendapatkan skor 60 dan

yang menjawab Ya berjumlah 60 responden dan yang menjawab Tidak 0 responden.

Tabel 9. Partisipasi Politik(Keikutsertaan Sosialisasi Dan Kampanye)

Masyarakat yang Tidak Menerima *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu calon kades	20
2. Saya mengikuti kampanye sebelum dilaksanakan pemilihan kades	10

Pada tabel 4.8 kuesioner keempat dengan pertanyaan saya mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh salah satu calon kades, yang menjawab Ya berjumlah 20 responden dan yang menjawab Tidak 20 responden sehingga skor yang diperoleh berjumlah 20 skor, kuesioner ke lima dengan pertanyaan Saya mengikuti kampanye sebelum dilaksanakan pemilihan kades, yang menjawab Ya berjumlah 10 responden dan yang menjawab Tidak 30 responden sehingga diperoleh skor pada kuesioner ke lima adalah 10 skor.

Tabel 10. Partisipasi Politik(Mencoblos Dan Keaktifan Pelaksanaan dalam Pemilihan Kades)

Masyarakat yang Tidak Menerima *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengikuti Proses dalam pilkades	10
2. Saya mencoblos calon kades yang memberi money politic	10
3. Saya mencoblos calon kades yang tidak memberi money politic	0
4. Saya memahami prosedur pemilihan kades sebelum mencoblos calon yang saya pilih	0
5. Saya mengetahui bakal calon kades	7
6. Kritik yang diberikan oleh pemilih merupakan wujud nyata dari penyaluran partisipasi politik	8
7. Saya memberikan saran kepada panitia pelaksanaan pilkades	40
8. Saya mendiskusikan masalah kades dengan warga lainnya	15
9. Saya mencermati proses pemilihan kades	5

Kuesioner ke 6, dengan pertanyaan Saya mengikuti proses proses dalam pilkades mendapatkan skor 10 dan yang menjawab Ya berjumlah 10 responden dan yang menjawab Tidak 30 responden, pada kuesioner 7, dengan pertanyaan Saya mencoblos calon kades yang memberi money politic mendapatkan skor 10 dan yang menjawab Ya berjumlah 10 responden sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 40 responden. Kuesioner 8, dengan pertanyaan Saya mencoblos calon kades yang tidak memberi money politic mendapatkan skor 0 dan yang menjawab Ya berjumlah 0 responden dan 40 responden menjawab Tidak. Kuesioner 9 dengan pertanyaan Saya

menjadi peserta suara pemilih karena mendapatkan money politic mendapatkan skor 0 dan yang menjawab Ya berjumlah 0 responden sedangkan yang menjawab Tidak 40 responden. Kuesioner 10 dengan pertanyaan Saya mengikuti pencoblosan kades dengan hati nurani sendiri tanpa dorongan apapun mendapatkan skor 7 dan yang menjawab Ya berjumlah 7 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 33 responden. Kuesioner 11, dengan pertanyaan Saya memahami prosedur pemilihan kades sebelum mencoblos calon yang saya pilih dengan skor 8 dan yang menjawab Ya berjumlah 8 responden sedangkan 32 responden menjawab Tidak. Kuesioner 12 dengan pertanyaan saya mengetahui bakal calon kades mendapatkan skor 40 dan yang menjawab Ya berjumlah 40 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 0 responden. Kuesioner Saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kades baru mendapatkan skor 15 dan yang menjawab Ya berjumlah 15 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 25 responden. Kuesioner 14, dengan pertanyaan Saya mencermati proses pemilihan kades skor 5 dan yang menjawab Ya berjumlah 5 responden dan yang menjawab Tidak berjumlah 35 responden.

Tabel 11. Partisipasi Politik(Mewujudkan Menyalurkan partisipasi politik) Masyarakat yang Tidak Menerima *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengetahui Perhitungan Jumlah pemilih pada saat setelah pemilihan kades	15
2. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	10
3. Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades	42

Kuesioner 15, dengan pertanyaan Saya mengikuti perhitungan jumlah pemilih pada saat setelah pemilihan kades mendapatkan skor 50 dan yang menjawab Ya 50 responden dan 10 responden menjawab Tidak. Kuesioner 16, Saya menerima hasil pemungutan suara dalam pilkades mendapatkan skor 10 dan yang menjawab Ya berjumlah 10 responden dan 30 responden menjawab Tidak. Kuesioner 17, Tanggapan yang di sampaikan oleh pemilih selalu bersifat positif dalam pelaksanaan kegiatan pilkades mendapatkan skor 42 dan yang menjawab Ya berjumlah 42 responden dan 18 responden menjawab Tidak.

Tabel 12. Partisipasi Politik(Mewujudkan Menyalurkan Partisipasi Politik) Masyarakat yang Tidak Menerima *Money Politic*

Pertanyaan Angket	Jumlah Skor
1. Saya Mengikuti kebijakan dan menjelaskan kebijakan kades	30
2. Saya mengawasi jalannya kepemimpinan kepala desa	20
3. Saya mengikuti apapun kebijakan yang dibuat oleh kades	30

Kuesioner 18, dengan pertanyaan Saya mengikuti kebijakan dan menjalankan kebijakan kades mendapatkan skor 30 dan yang menjawab Ya berjumlah 30 responden sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 10 responden, kuesioner 19, dengan pertanyaan Saya mengawasi jalannya kepemimpinan kepala desa mendapatkan skor 20 dan yang menjawab Ya berjumlah 20 responden dan yang menjawab Tidak 20 responden. Kuesioner 20, dengan pertanyaan Saya mengkritisi apapun kebijakan yang dibuat oleh kades mendapatkan skor 30 dan yang menjawab Ya berjumlah 30 responden dan yang menjawab Tidak 10 responden.

Tabel 13. Jumlah Skor Sesuai Sub Indikator

Sub indikator	Jumlah Skor yang Menerima <i>Money Politic</i>	Jumlah Skor yang tidak menerima <i>Money Politic</i>
Keikutsertaan sosialisasi dalam pilkades	55	20
Mengikuti kampanye	50	10
jumlah	105	30

Jumlah skor pada indikator sebelum pemilihan kepala desa yaitu keikutsertaan sosialisasi dan kampanye pada pemilihan kepala desa dengan skor 105 di dapat oleh responden yang menerima money politic dan 30 di peroleh masyarakat yang tidak mendapat money politic.

Tabel 14. Jumlah Skor Sesuai Sub Indikator

Sub indikator	Jumlah Skor yang Menerima <i>Money Politic</i>	Jumlah Skor yang tidak menerima <i>Money Politic</i>
Mencoblos	179	20
Keaktifan dalam Pelaksanaan Kades	255	75
jumlah	434	95

Dilihat dari jumlah skor pada responden yang menerima money politic dan yang tidak menerima dapat membuktikan bahwa pentingnya mencoblos dalam pilkades diperoleh responden yang menerima money politic yang dapat meningkatkan partisipasi politik dengan jumlah 434 skor dan 95 skor di dapat oleh responden yang tidak mendapatkan money politic.

Tabel 15. Jumlah Sesuai Sub Indikator

Sub indikator	Jumlah Skor yang Menerima <i>Money Politic</i>	Jumlah Skor yang tidak menerima <i>Money Politic</i>
Mengikuti kegiatan-kegiatan baru oleh kades baru	145	67
Mewujudkan penyaluran partisipasi politik	161	80
jumlah	306	147

Jumlah skor keseluruhan yang di dapat oleh responden yang menerima money politik berjumlah 306 skor dan yang tidak menerima money politic berjumlah 147 skor. Dapat dilihat bahwa tingkat keikutsertaan dalam berpartisipasi politik yang mendapatkan skor tertinggi adalah masyarakat yang menerima money politik.

Alternatif Pilihan	F_0	f_h	$F_0 - f_h$	$(F_0 - f_h)^2$	$\frac{(F_0 - f_h)^2}{f_h}$
Menerima Money Politic	794	350	444	197136	563,24
Tidak Menerima Money Politic	225	350	-125	15625	44,64
Jumlah	989	700	569	212761	607,88

Berdasarkan taraf kesalahan yang ditetapkan 5%, maka harga chi kuadrat tabel 3,841 ternyata harga chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel (607,88 > 3,841). Sesuai ketentuan kalau harga chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan sampel ternyata masyarakat yang mendapatkan money politic dalam pilkades partisipasinya lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak mendapatkan money politic.

Pembahasan

Penerimaan money politic adalah masyarakat desa munung yang mendapatkan uang, sembako atau fasilitas umum yang dilakukan oleh kandidat - kandidat calon kades, terjadinya penerimaan money politic terjadi disaat sebelum pemilihan kades dilakukan di saat sosialisasi kandidat calon kades dan tim sukses dengan menyertakan masyarakat desa munung untuk mengikuti kampanye-kampanye yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon kades. Dari sekian banyak masyarakat desa munung yang mendapatkan suap dari calon kades dapat meningkatkan partisipasi politik, karena suap dilakukan setiap 5 tahun sekali pada waktu ajang pemilihan kepala desa

Dampak yang dihadirkan akibat dari money politic yaitu dampak bagi masyarakat maupun dampak bagi para

calon kepala desa itu sendiri. Dampak bagi para calon kepala desa ada dua sisi, yang pertama apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya money politic yang mereka lakukan, mapun dampak dari kekalahan para calon kepala desa yang gagal dalam money politic yang mereka lakukan. Bagi para calon kades yang gaga; dampaknya bagi psikologi dan kesehatan mereka. Tidak sedikit dari para calon kepala desa yang gagal akhirnya frustasi dan hampir gila atau mendadak terkena serangan jantung. Hal ini karena mereka sudah keluar banyak uang dan tidak terpilih dalam pilkades

Dampak lainnya apabila para calon kepala desa itu berhasil melenggang mendapatkan kursi kepala desa berkat dari *money politics* adalah penyalahgunaan jabatan, karena bisa kita lihat banyak kasus-kasus korupsi di ranah legislatif. Mereka berfikir karena mereka sebelum menduduki kursi legislatif mereka sudah habis modal besar-besaran, sehingga mereka mencari cara agar agar modal yang telah habis mereka gunakan *money politics* kembali lagi, istilah lainnya “balik modal”. Selain itu, karena tidak terjaminnya kompetensi yang dimiliki oleh calon kepala desa yang terpilih bisa menjadikan manajemen pemerintahan desa yang berantakan. Mereka para calon kepala desa umumnya hanya bisa mengumbar janji tidak tahuseperti apa kompetensi yang mereka miliki.

Dampak *money politics* dalam masyarakat sendiri terlihat bahwa *money politics* dijadikan ajang mencari penghasilan. Masyarakat awam tidak mepedulikan nilai-nilai demokrasi. Bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah. Dampak lain terlihat dengan rendahnya kepercayaan lagi dari masyarakat kepada para calon kepala desa. *Money politics* bisa juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat telah berhutang budi kepada calon kepala desa yang telah memberikan bentuk penyuaan, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon kepala desa lainnya buruk dibandingkan yang mereka dukung, di sinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon kepala desa.

Pada dasarnya partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya. Termasuk dalam pemilihan kepala desa keikutsertaan masyarakat dalam mencoblos memberikan suara pemilih kepada pemimpin masyarakat yang akan mensejahterakan dan merubah pola keaktifan dalam

bermasyarakat, untuk mengembangkan desa lebih maju dan sejahtera. Sehingga dengan mengikuti suara pemilih dapat menentukan dan mendapatkan kepala desa yang diinginkan yang dapat mewujudkan visi dan misinya.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya.

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Sebagai usaha terorganisasi oleh para warga negara untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan umum. Partisipasi politik sebagai suatu kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan. Atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktifitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal dan ketertiban dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Yang mendorong dirinya untuk memberi sumbangan bagi terciptanya tujuan dan membagi tanggung jawab di antara mereka

Pada dasarnya pemilihan kepala desa merupakan wadah demokrasi bagi masyarakat dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih pemimpin. Dan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung setempat, dimana calon kepala desa memberikan uang atau *money politic* kepada masyarakat desa munung yang sudah wajib mengikuti pemilihan kepala desa. Dalam proses pemilihan kepala desa dimana masyarakat desa munung ada yang menerima *money politic* dan ada juga yang tidak menerima *money politic*. Dimana penerima *money politic* dilihat dari tahun ke tahun lebih meningkat daripada masyarakat yang tidak menerima *money politic*, karena penerima *money politic* di akibatkan beberapa faktor seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan politik yang dialami oleh warga desa munung sehingga para calon kepala desa memanfaatkan keadaan untuk memperoleh sebuah kekuasaan.

Pada kegiatan pemilihan kepala desa banyak hal yang merupakan ciri-ciri kegiatan partisipasi politik antara lain. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Kegiatan itu di arahkan untuk mempengaruhi

pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintahan termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan mempengaruhi pemerintahan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan kegiatan tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintahan melalui pihak yang dianggap dapat menyakinkan pemerintahan. Kegiatan mempengaruhi pemerintahan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (Konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*)

Pada teori partisipasi politik individu, dimana masyarakat mempunyai keaktifan dalam berpolitik, keaktifan dalam artian mengikuti pencoblosan, ikut sosialisasi, mengikuti kampanye sehingga dapat meningkatkan partisipasi politik dalam keikutsertaan suara pemilih. Masyarakat memiliki perilaku dan pemikiran sendiri-sendiri sehingga tidak tentu masyarakat aktif dengan diri sendirinya, dengan adanya penerimaan *money politic* masyarakat juga dapat aktif dalam mengikuti suara pemilih, sosialisasi ataupun kampanye dan dengan pemberian-pemberian yang diberikan kepada masyarakat desa munung juga dapat meningkatkan partisipasi dalam pilkades. Sehingga dengan adanya keaktifan masyarakat dalam pilkades ditentukan oleh diri sendiri. Apakah memilih karena partisipasi politik individu atau karena penerimaan *money politic*.

Dari hasil penelitian masyarakat yang mendapat *money politic* lebih tinggi dari pada masyarakat yang tidak mendapatkan *money politic*. Dari hasil jumlah penelitian berupa angket yang di sebarakan kepada 60 responden yang mendapatkan *money politic* dan 40 responden yang tidak mendapatkan *money politic* dapat di jumlah bahwa masyarakat yang penerima *money politic* mendapatkan jumlah skor 735. Sedangkan yang tidak menerima *money politic* mendapatkan jumlah skor sebanyak 222. Dengan pertanyaan tentang partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Dan jika dilihat dari tingkat pendidikan responden lebih banyak setuju dengan adanya *money politic* dan partisipasi politik pada pendidikan menengah ke atas. dengan penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa penerimaan *money politic* dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian, sebelum menjelaskan hasil kesimpulan pada dasarnya partisipasi politik dilihat dari tahun ke tahun semakin meningkat dikarenakan pemberian *money politic* yang dilakukan

oleh calon kades baru, partisipasi politik memiliki tiga golongan. Yang pertama sebelum pemilihan kades terdapat sosialisasi dan kampanye yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan dengan adanya sosialisasi hanya beberapa masyarakat yang mengikuti yaitu masyarakat yang aktif dalam berpolitik dan masyarakat yang selalu mendapatkan money politic dari tahun ke tahun, pada saat pemilihan kades antara lain mencoblos pada hari pemilihan kades yang mencoblos lebih banyak masyarakat yang mendapatkan money politic juga dan disaat sesudah kades banyak hal yang dilakukan saat kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala desa, seperti kerja bakti masyarakat desa munung antusias dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan hanya beberapa % masyarakat yang tidak mendapatkan money politic yang mengikuti. Sehingga sangat berpengaruh pesat money politic terhadap tingkat partisipasi pada masyarakat Desa Munung

Money politics tidak akan pernah jauh terpisah dari partisipasi politik, semua masyarakat pasti akan mengeluarkan suaranya demi desanya yang akan menjadi baik tetapi dengan adanya money politics juga. Jika tidak ada politik uang maka suara rakyat dari beribu rakyat hanya sedikit yang mencoblos, karena kita ketahui bahwa masyarakat desa tidak sama dengan masyarakat kota. Desa sangat mementingkan dan membudidayakan money politik di setiap pemilihan umum. Karena dengan adanya money politic masyarakat semangat untuk memilih atau mencoblos. Sehingga money politics sangat berpengaruh pada masyarakat dan tingkat partisipasi politik akan semakin meningkat sesuai dengan jumlah penduduk di Desa Munung Kabupaten Nganjuk

Adanya praktik money politics menunjukkan bahwa para calon pejabat publik yang akan menduduki pemerintahan tidak benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka jalan keluarnya dengan mendorong, mengajak dan membeli suara pemilih. Praktek semacam itu biasanya dilakukan saat kampanye menjelang ajang persemiaan demokrasi dengan disertai visi, misi dan program kerja yang dijanjikan oleh calon pejabat publik akan menumpang segala aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Dalam pemilihan umum praktek money politics sudah menjadi budaya bahkan dilestarikan dalam pesta demokrasi dinegara kita sebagai usaha untuk mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan apalagi pada pemilihan kepala desa, fenomena tersebut sudah di anggap biasa dan umum bahkan dilakukan secara terang-terangan. Hal itu dikarenakan adanya hubungan saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain.

Faktor utama yang mendorong masyarakat menerima money politic dan mendorong orang untuk berpartisipasi

yaitu karena adanya perangsang maka mengikuti partisipasi politik dalam kehidupan berpolitik, faktor karakteristik pribadi seseorang, faktor situasi atau lingkungan politik sendiri, jadi dalam pemilihan kepala desa tidak akan terpisah dari tim sukses, karena tim sukses jalan utama untuk memberikan pasangan atau uang transport yang dibrikan kepada penerima money politic. Dan antara calon kades dengan masyarakat yang menerima money politic mempunyai feedbank atau mutualisme saling menguntungkan.

Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah demokrasi bagi masyarakat Desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pemimpin Desa, seperti yang terjadi di Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang akan dibuat penelitian, berbagai macam usaha yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa untuk memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat agar memperoleh suara terbanyak dalam ajang pemilihan Kepala Desa tersebut. Salah satu cara yang merupakan rahasia umum dan merupakan hal biasa bagi masyarakat desa adalah dengan memberikan money politic kepada masyarakat yang sudah wajib untuk memilih. Karena money politic merupakan hal biasa bagi masyarakat dan seakan-akan seperti hal yang setengah wajib dilakukan oleh Calon Kepala Desa hal tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik dan mempunyai keterkaitan yang dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Desa.

Merebut kekuasaan dan kedudukan politik sangat dekat dengan uang (materi) sebagai perantaranya. Dalam merebut kedudukan politik maka setiap calon kepala desa yang ingin menduduki kursi yang diinginkan harus terlibat dalam ajang pemilihan umum. Calon kepala desa yang mencalonkan diharapkan memiliki visi, misi dan program kerja yang dapat mengayomidan memenuhi kebutuhan masyarakat pada pemerintahan dimasa yang akan datang. Dan bagaimanapun Kandidat calon kepala desa yang ada di Desa Munung Kabupaten Nganjuk juga sudah menjelaskan ke masyarakat bagaimana visi dan misinya setelah mereka di nyatakan sebagai kepala desa yang sah maka mereka harus menerapkan daerahnya sesuai dengan visi dan misinya.

Masyarakat desa munung yang menerima money politic juga mempunyai hak untuk tidak memilih tetapi pada kenyataanya banyak yang memilih. Dimana pada penelitian awal dapat ditemukan bahwa calon pilkades tidak memberi money politic ke semua warga munung melainkan hanya 80% untuk menguatkan sebuah kekuasaan yang di inginkan. Dalam persaingan ketat antara kandidat satu dengan kandidat kedua maka calon kades harus dapat secara cepat memberikan suap atau

money politic kepada yang menerima money politic di masyarakat desa munung.

Penerima money politic di desa munung di akibatkan beberapa faktor seperti kemiskinan dan pendidikan politik, kurangnya pendidikan yang di alami oleh warga desa munung sehingga money politic sangat diharapkan dalam pilkades dan tidak memahami bagaimana kewajiban menjadi WNI yang baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan demi membangkitkan dan menjaga desa dengan pemimpin yang bijak. Selain faktor pendidikan ada juga faktor kemiskinan yang terjadi di desa munung karena faktor tersebut memang kenyataan yang di alami di desa munung. Sehingga masyarakat menerima money politic sangat diharapkan.

praktek money politics itu merupakan penguatan melanggar hukum karena termasuk dalam perbuatan pihak pidana tetapi masyarakat tidak meperdulikan mereka bersedia menerima segala macam materi yang diberikan oleh pihak yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa semata mata hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kurang berfikir. Lebih panjang mereka hanya berfikir dapat mencukupi kebutuhannya walaupun dalam waktu sesaat secara bahasa money politics atau politik uang memiliki dua dimensi yakni politik dan uang. Politik diidentifikasi suatu orientasi pada kekuasaan dan uang dipersepsikan sebagai salah satu kekuatan yang bersih material secara sederhana praktek money politics dalam penulisan umum. Biasanya berupa pemberian uang atau materi lainnya kepada calon pemilu dengan harapan pemilu tersebut memberikan dukungan atau memilih calon pejabat publik yang memberikan uang. Di sini terlihat bahwa politik sangat erat dengan kekuasaannya, karena pada dasarnya tujuan perjuangan politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik. Sementara itu kekuasaan sangat dekat dengan uang. hal ini jelas pelanggaran kampanye dan penyimpanan dalam sistem demokrasi.

Hubungan penerimaan money politic dengan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, terdapat hubungan dibuktikan dengan hasil jumlah nilai angket dan perhitungan chi kuadrat Berdasarkan taraf kesalahan yang ditetapkan 5%, maka harga chi kuadrat tabel 3,841 ternyata harga chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel (607,88 3,841). Sesuai ketentuan kalau harga chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan sampel ternyata masyarakat yang mendapatkan money politic dalam pilkades partisipasinya lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak mendapatkan money politic. Sehingga penerimaan money politic mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi politik pada masyarakat Desa Munung Kec Jatikalen Kab Nganjuk dalam pemilihan kepala desa.

Saran

Pemilihan kepala desa dilakukan setiap 5 tahun sekali, untuk dapat meningkatkan partisipasi politik maka perangkat desa atau anggota kinerja desa dapat membantu dan memberikan masukan bagaimana pentingnya memilih calon kepala desa yang dapat membangkitkan dan mensejahterakan masyarakat . sehingga tidak memacu pada money politic saja karena tidak semua masyarakat desa munung mendapatkan money politic sehingga tidak adil dalam kemasyarakatan. Sehingga tidak memacu pada money politic saja karena tidak semua masyarakat dsa munung mendapatkan money politic tidak adil dalam kemasyarakatan, penerima money politic di desa munung semakin meningkat dan mengikuti pemilihan kepala desa, karena warga desa munung mengutamakan money politic karena kurangnya pemahaman berpolitik dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehingga membuat warga desa munung membuat tradisi penerima money politic sebelum pemilihan kepala desa dilakukan. dengan adanya pemilihan ini membuktikan bahwasannya pengaruh penerima money politic terdapat partisipaso politik pada pemilihan kepal desa di Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dilihat dari tingkat pendidikan pemiih sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara untuk ikut serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik dengan maksud agar kebijakan politik yang dibentuk oleh elit politik sesuai dengan keadaan dan keinginan rakyat, sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Dan dengan adanya penerima money politic dapat meningkatkan pemili untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan oerhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintahan adalah penilaian seseorang terhadap pemerintahan, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak

Mencakup memberikan suara sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan seorang calon, dan lainnya, adanya kegiatan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan Desa yang sejahtera dan mempunyai pemimpin yang dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sehingga untuk memperolehh sebuah kekuasaan yang diinginkan oleh calon Kades maka untuk

mencari dukungan masyarakat dengan adanya penerima money politic. Karena pada dasarnya money politic sangat menguntungkan bagi semua masyarakat yang sudah wajib untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. *money politics* dijadikan ajang mencari penghasilan. Masyarakat awam tidak mepedulikan nilai-nilai demokrasi.

Bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah. Penerima money politic di desa munung semakin meningkat dan mengikuti pemilihan kepala desa, karena warga desa munung menguatamakan money politicnya karena kurangnya pemahaman berpolitik dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehingga membuat warga desa munung membuat tradisi penerima money politic sebelum pemilihan kepala desa dilakukan. Dengan adanya pemilihan ini membuktikan bahwasannya pengaruh penerima money politic terhadap partisipasi politi pada pemilihan kepala desa di Desa Munung Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk, dilihat dari tingkat pendidikan pemilih sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik. Dampak lain terlihat dengan rendahnya kepercayaan lagi dari masyarakat kepada para calon kepala desa. *Money politics* bisa juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat telah berhutang budi kepada calon kepala desa yang telah memberikan bentuk penyuaan, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon kepala desa lainnya buruk dibandingkan yang mereka dukung, di sinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon kepala desa.

Penerima money politic dilakukan di setiap pemilihan kepala desa, dengan adanya penerimaan money politic tingkat partisipasi politik seperti keikutsertaan mencoblos, keikutsertaan sosialisasi akan semakin meningkat. Dengan bukti atau percakapan saat dilapangan bahwasanya masyarakat desa munung memang diberi oleh salah satu calon kades money politic, saat percakapan tersebut masyarakat berkata bahwa mereka senang setiap ajang pemilihan kades. Karena bagi mereka sangat menguntungkan dan mereka mengharapkan pemberian money politic, sembako dan fasilitas umum kepada calon kades. Dan saat pemilihan kades dilakukan yang menerima money politic juga mengikuti partisipasi politik (mencoblos), pada saat dilapangan saya bertanya kepada 60 masyarakat yang mnerima bahwasannya mengikuti pencoblosan kades karena mendapatkan money politic, dan yang didukung adalah yang memberikan money politic dan mempunyai visi dan misi yang baik. Masyarakat yang mendapatkan money politic lebih banyak daripada yang tidak mendapatkan *money politic*. Sehingga masyarakat harus

menyadari bahwa berpolitik penting dalam mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur penelitian : suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Agustino, Leo, 2007. *Perihal ilmu politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Budiardjo, Miriam, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Basri Seta, 2011. *Pengantar ilmu politik*. Kota Bekasi: Indie Bock Corner
- Hastuti dkk. (2012). *Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan dan desa Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Rahman Arifin, 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya : SIC
- Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sudirwo, Daeng. Drs, 1980. *Pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan pemerintahan Desa*, Bandung, Angkasa Anggota IKAPI
- Rush, mighael & Philip Alhoffs. 1997. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarbaini, syahrial. 2004. *Sosiologi politik*. Bogor :Gralia Indonesia Anggota IKAPI
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2000. *Pendidikan politik ikhwanul muslimin solo* : Era Intermedia
- Ismawan, Indra, Money politicss - *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999
- MD, Mahfud, Moh, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005
- Sastroatmodjo, Sudijono, *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press, 1995
- Raga maram, rafael. 2001. *pengantar sosiologi politik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Kencana syafii, Inu. 2002. *sistem pemerintahan indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Susilo, Suko, dkk. 2003. *Sosiologi politik*. Surabaya: yayasan kampusina surabaya
- Hamid, Edy Suandi. (2009). *Memperkokoh otonomi daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Umam, Khoirul, Ahmad, *Budaya Korupsi di Indonesia*
Semarang: Rasail, 2006

UNESA. 2000. Pedoman Penelitian Artikel Jurnal.
Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Surabaya.

Sugiyono. 2008. Metodologi Kuantitatif R&D.
Bandung: Remaja Rosdakarya.



UNESA
Universitas Negeri Surabaya